

INDEKS KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI KALIMANTAN TIMUR

Index of Harmony Inter-Religious Communities in East Kalimantan

MUHAMMAD RAIS

MUHAMMAD RAIS

Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Makassar
Jl. AP. Pettarani No. 72 Makassar
Telp./ Fax. 0411-452952
e-mail: muh_rais71@yahoo.com
Naskah diterima: 31 Agustus 2012
Naskah direvisi: 8-12 Oktober 2012
Naskah disetujui: 13 November 2012

ABSTRAK

Riset kebijakan ini bertujuan mendeskripsikan secara evaluatif, aktualisasi dan habituasasi ideologi kerukunan antarumat beragama, baik yang terkonstruksi melalui kebijakan Negara secara top down maupun konstruksi damai berbasis nilai lokal yang secara proaktif diadvokasi oleh elit-elit agama. Dengan memanfaatkan metode survey dalam kerangka mengukur respon aktual dan respon evaluatif kalangan responden--dalam konteks riset ini, hanya meng-cover umat Islam dan Kristiani di, Kalimantan Timur. Hasil riset mendeterminasi bahwa respon masyarakat terkait kerukunan antarumat beragama secara persepsional terkategori sangat baik/positif, dengan indeks rata-rata 0,79. Walaupun tidak dapat dinafikan bahwa ditemukan fakta lain, yang terungkap melalui instrumen wawancara bahwa di akar-rumput mengemuka nalar berbeda, di mana responnya justru cenderung negatif yang dielaborasi kondisi obyektif adanya ketegangan dan riak-riak yang berpotensi eskalatif menjadi konflik identitas secara manifes antara penduduk lokal dengan kalangan pendatang.

Kata kunci: Indeks Kerukunan, komunitas agama.

ABSTRACT

This policy research aims to describe about the actualization and habitualization of ideology on interreligious harmony. This ideology is constructed whether through top-down state policies or local value basis which is proactively advocated by elites of religions. This research uses a survey method to gain actual and evaluative responses from the respondents which is limited for Moslem and Christian groups in East Kalimantan. The research findings depicts that perceptions of the public related to inter-religious harmony tend to be very positive, the response rate represented the average index of 0.79. Although it could not be denied that there are other facts found in this study by interviewing people at the grass roots. These people gave different response; their responses tend to be negative which may lead to a conflict of identity between local people and migrants.

Keywords: index of harmony, religious community.

PENDAHULUAN

Wacana dan konstruksi toleransi antarumat beragama dalam bingkai NKRI kerap kali *complicated*, sarat dengan kontroversi antara kalangan konservatif yang merasa nyaman dengan format kerukunan beragama yang telah eksis pada Era Orde Baru, dan kalangan progresif yang menginginkan arsitektur kerukunan yang lebih mengakar dan komprehensif dengan mengarusutamakan (*mainstreaming*) ko-eksistensi bahkan pro-eksistensi.

Masing-masing kelompok memiliki pijakan empiris sebagai sarana justifikasi atas klaim kebenaran. Hal ini tampak pada kondisi obyektif bahwa pada era Orde Baru, sangat langka kita menemukan konflik komunal-identitas, terutama yang ditengarai bernuansa SARA, apalagi kekerasan atas nama agama yang eskalatif, seperti yang terjadi di Ambon, dan Poso. Tatanan sosial-keagamaan tersebut merupakan pengejawantahan politik keamanan dan stabilitas demi sukses pembangunan yang diterapkan penguasa rezim Orde Baru, dengan jargon-jargon yang tipikal konstruksi rezim tersebut, seperti subversi dan makar.

Pasca *lengserkeprabonnya* penguasa, satu-persatu sisi kelemahan bangunan sosial, politik dan ekonomi yang menjadi basis rezim ini membunyah ke permukaan, salah satunya konstruksi kerukunan antarumat beragama yang ditengarai sangat formalistik, elitis-”persatean” bukan persatuan secara fundamental, menderita patologi politik gincu yang hanya indah di permukaan dengan menggeser politik garam yang justru mengedepankan pemerataan secara holistik.

Rumusan Masalah

Mengaca pada konteks kerukunan di atas, maka peneliti kehidupan keagamaan Balitbang Agama Makassar berupaya memotret kerukunan tersebut dengan perangkat indeks kerukunan umat beragama (IKUB), dalam kerangka mengukur dan mendeskripsikan peta kerukunan, dengan memilih Kalimantan Timur sebagai *setting-riset* artikel. Tulisan ini merupakan hasil riset di empat belas kabupaten/kota. Masalah penelitian yang ingin dicarikan solusi-konstruktifnya

adalah ”Bagaimana tingkat Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Timur?”

Tujuan Penelitian

Out put riset ini diharapkan menjadi basis pengambilan kebijakan kalangan *stakeholder*, relevansinya dengan terciptanya harmoni (*equilibrium*) kehidupan umat beragama, sebagai lahan persemaian kohesivitas warga bangsa.

Kerangka Teori

Teori kerukunan sosial memandang keseluruhan/harmoni hubungan sosial dapat terjadi dalam interaksi antarelemen masyarakat dan budayanya. Setidaknya ada lima teori dasar berkaitan dengan kerukunan (Turner, 1991: 234), yaitu 1) *Teori nilai*: kerukunan dan integrasi sosial dapat terjadi apabila masing-masing kelompok dan subkultur dalam masyarakat saling mentaati tatanan nilai-nilai sosial budaya. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini dan dijalankan dalam masyarakat. 2) *Teori struktural*: kerukunan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan masyarakat. Dengan kata lain kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi di bawah tekanan. 3) *Teori idealis*: kerukunan sosial dapat terjalin apabila terdapat ide, gagasan, visi ataupun ideologi yang mengikat anggota masyarakat secara keseluruhan. 4) *Teori resiprositas*: kerukunan sosial dan integrasi sosial dapat terjadi apabila dalam masyarakat dibangun jalinan sosial yang mantap. 5) *Teori interaksi*: kerukunan sosial dapat terjadi apabila terjadi interaksi rasional antarkelompok, etnis, agama dll dalam masyarakat yang saling menguntungkan, memberikan manfaat bagi masing-masing.

Variabel penelitian ini ada empat, yaitu: 1) Hubungan sosial antarkelompok agama yang meliputi kesediaan berinteraksi secara sosial dan personal, kesediaan terlibat dalam pembangunan rumah ibadah, keterbukaan terhadap kegiatan keagamaan orang lain, dan kesediaan mendengar pendapat tokoh agama lain; 2) Eksistensi keagamaan, Konflik dan Resolusi Konflik yang meliputi

penyebaran agama, etika antarkelompok agama, faktor penyebab konflik, dan proses penyelesaian konflik; 3) Kebijakan pemerintah, meliputi aspek kebijakan yang mendukung terciptanya penyelesaian konflik; dan 4) Potensi lokal, meliputi dukungan sumber daya lokal seperti ormas yang ada, tokoh agama, tokoh adat, tokoh etnik, dan hukum adat dalam mendukung pembangunan kerukunan antarumat beragama.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini diimplementasikan pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Samarinda, Balikpapan, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang, Berau, Bulungan, Tanah Tidung, Malinau, Nunukan, Tarakan, Paser, dan Penajam.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan jumlah rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 947.625 kepala keluarga. Penetapan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin: untuk menentukan besaran jumlah sampel menggunakan teori slovin ($n = N/(1+N.d^2)$).¹

Dengan menggunakan rumus ini, ditemukan jumlah sampel se-Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1.110. Sedangkan persebaran angket ke kabupaten/kota yang terpilih dilakukan dengan melihat komposisi penduduk Kalimantan Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden dengan sistem purposif dengan memperhatikan jumlah persentasi penduduk berdasarkan agama. Di setiap kabupaten ditetapkan satu kecamatan yang paling tinggi tingkat pluralitasnya. Lalu di setiap kecamatan ditentukan kelurahan atau desa yang juga paling tinggi tingkat pluralitasnya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan kuesioner yang didukung oleh wawancara terstruktur dan wawan-

cara tak terstruktur kepada beberapa informan yang sekaligus berasal dari sebagian responden.

Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menetapkan indeks yang dijadikan landasan kerukunan antarumat beragama. Indeks kerukunan ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Nilai Total}}{\text{Responden} \times \text{jumlah pertanyaan} \times 4}$$

Dari rumus di atas ditetapkan gradasi indeks kerukunan sebagai berikut: 0,01-0,25 = sangat buruk, 0,26- 0,50 = buruk, 0,51- 0,75 = baik, 0,76-1 = sangat baik.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tentang Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 1.110 orang yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (lihat metode penelitian) yang disebar ke 14 kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian. Dengan memerhatikan data statistik kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS Kalimantan Timur di mana Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara adalah wilayah yang dihuni oleh mayoritas penduduk hingga mencapai 54% dari total penduduk Kaltim maka peneliti menentukan persebaran angket. Samarinda sebagai ibukota memperoleh jatah responden paling banyak yaitu 253 responden (22,8%), sedangkan Kab. Tanah Tidung sebagai wilayah yang paling baru mendapatkan jatah responden sebanyak 7 orang (0,5%).

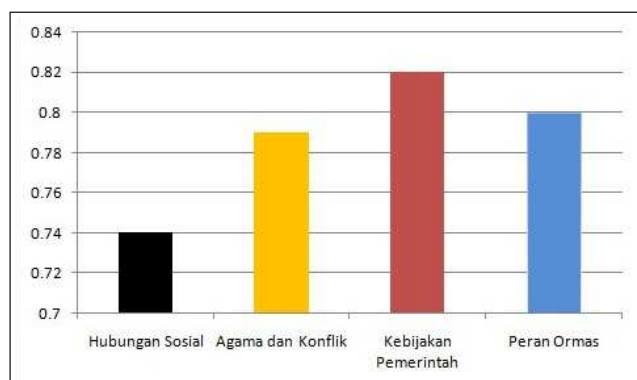
Persebaran responden berdasarkan latar belakang agama adalah sebagai berikut. Responden beragama Islam sebanyak 921 orang (83,1%) sedangkan yang beragama Kristen sebanyak 112 orang (10,1%) dari total responden. Enampuluh dua orang (5,6%) mewakili responden beragama Katolik, dan Hindu dan Budha masing masing sejumlah 7 orang (0,6%).

¹ n= jumlah Sampel, N= Jumlah Populasi, d = galat pendugaan

Indeks Kerukunan Antarumat Beragama di Provinsi Kalimantan Timur

Dengan menggunakan rumus indeks (seperti penjelasan pada bagian analisis penelitian) ditemukan bahwa indeks kerukunan Provinsi Kalimantan Timur berada pada angka 0,79 (kategori sangat baik). Ini menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama di Kalimantan Timur dalam kondisi yang sangat kondusif. Kejadian konflik antaretnik di Tarakan tahun 2010 dan Bulungan pada bulan Februari 2012 yang lalu tampaknya tidak banyak memengaruhi persepsi publik terhadap isu hubungan keagamaan antarumat beragama di Kalimantan Timur. Indeks 0,79 ini diperoleh dari akumulasi nilai indeks per variabel yang diukur sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1: Indeks Kerukunan Berdasarkan Variabel



Sumber data: angket yang diolah

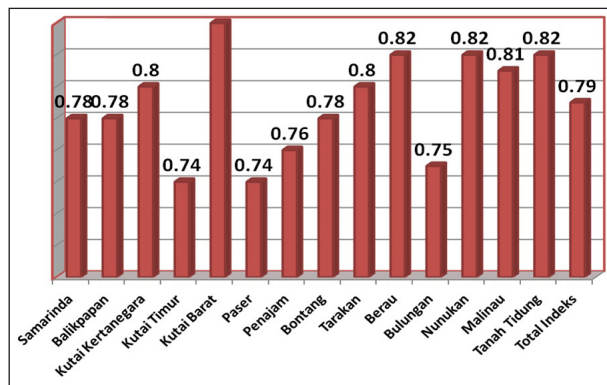
Data pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel yang diukur menunjukkan indeks yang positif. Tiga dari empat variabel di atas berada pada level yang sangat positif dan satu variabel berada pada level baik (variabel 1, hubungan sosial).

Hal yang menarik dari data di atas adalah variabel hubungan sosial yang “hanya” mendapatkan nilai baik (0,74) atau terendah dari tiga variabel lainnya. Ini menunjukkan ada aspek-aspek tertentu dalam relasi sosial yang masih menyisakan sedikit persoalan meski levelnya kecil. Sebaliknya, variabel ketiga (peran pemerintah) yang mendapatkan indeks tertinggi menunjukkan adanya kepercayaan yang sangat tinggi kepada pemerintah untuk mengelola kerukunan.

Indeks Berdasarkan Kabupaten/Kota

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa Provinsi Kalimantan Timur memperoleh indeks kerukunan 0,79 (kategori sangat baik). Menarik untuk melihat lebih jauh fluktuasi indeks kerukunan di masing-masing kabupaten/kota yang menjadi sasaran penelitian. Hal itu dapat terlihat pada Grafik 5.1 di bawah:

Grafik 5.1: Indeks Berdasarkan Kab./Kota



Sumber data: angket yang diolah

Data pada Grafik 5.1 menunjukkan dua hal:

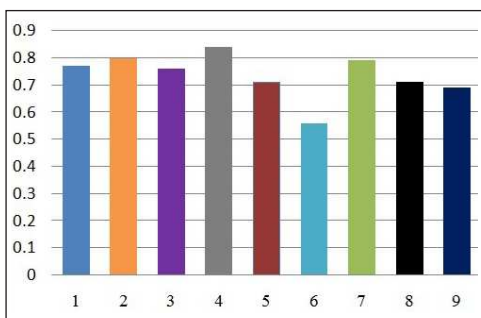
- Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan indeks kerukunan yang sangat baik; 11 dari 14 kabupaten/kota mendapatkan indeks sangat baik (0,78- 0,84), dan 3 kabupaten lainnya mendapatkan indeks baik (0,74-0,75).
- Jika menggunakan urutan indeks kerukunan, maka wilayah yang paling tinggi indeks kerukunannya adalah Kabupaten Kutai Barat dengan indeks 0,84 sedangkan yang terendah adalah Kutai Timur dan Paser dengan indeks 0,74.

Indeks Kerukunan Berdasarkan Empat Indikator

Telah disebutkan sebelumnya, ada empat variabel utama yang menjadi dasar pengukuran indeks kerukunan di Provinsi Kaltim. Grafik 5.2 berikut ini merupakan penjelasan indeks kerukunan berdasarkan subvariabel dari empat variabel penelitian tersebut.

Data pada Grafik 5.2 menunjukkan keseluruhan subvariabel yang diukur berada pada level

Grafik 5.2: Indeks Variabel Hubungan Sosial



Keterangan: 1) Bersedia bergaul; 2) Bersedia mengundang; 3) Bersedia menghadiri undangan; 4) Bersedia melakukan transaksi; 5) Bersedia memberi sumbangan; 6) Bersedia membantu pembangunan rumah ibadah; 7) Bersedia bertetangga; 8) Terbuka pada kegiatan keagamaan orang lain; 9) Bersedia mendengar saran tokoh agama lain.

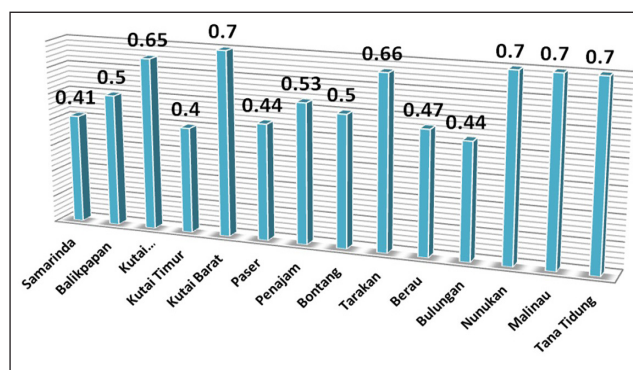
Sumber data: angket yang diolah

baik dan sangat baik. Data ini menunjukkan adanya kecenderungan fluktuasi sikap dan perilaku pada subvariabel tertentu. Misalnya subvariabel 4 (bersedia bertransaksi) yang memperoleh indeks 0,84 atau sangat baik (bahkan paling tinggi di antara sub variabel lainnya). Ini berarti dalam konteks hubungan ekonomi, masyarakat Kaltim secara umum tidak memperlakukan identitas keagamaan. Konfigurasi masyarakat Kaltim (khususnya di perkotaan) adalah masyarakat pedagang menjadi salah satu pendukung dari perilaku ini. Pada aspek sosial lainnya seperti kesediaan bergaul, kesediaan saling mengundang, dan kesediaan bertetangga mendapatkan indeks sangat baik. Ini menunjukkan adanya pola relasi sosial yang relatif aman dan setidaknya dapat menjadi modal sosial dalam membangun masyarakat Kaltim yang multikultural.

Subvariabel yang sedikit menjadi perhatian adalah empat aspek yang memiliki kaitan “teologis” (indikator 5,6,8,dan 9) yang mendapatkan indeks baik. Fluktuasi perilaku sosial yang menurun pada tiga aspek ini menunjukkan adanya kehati-hatian bagi responden untuk menjalin hubungan dalam aspek keagamaan. Bahkan pada subvariabel 6 (kesediaan membantu pembangunan rumah ibadah) di beberapa wilayah mendapatkan respon negatif, seperti pada Grafik 5.3.

Data pada Grafik 5.3 menunjukkan bahwa di beberapa wilayah di Provinsi Kaltim seperti Kota

Grafik 5.3: Indikator Pembangunan Rumah Ibadah



Sumber data: angket yang diolah

Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, Paser, Bontang, Berau, dan Bulungan, indeks kesediaan terlibat dalam pembangunan rumah ibadah berada pada level buruk. Artinya, sebagian masyarakat di wilayah tersebut enggan untuk melibatkan diri pada kegiatan yang terkait dengan “ruang privat” agama tertentu seperti terlibat dalam pembangunan rumah ibadah.

Munculnya perilaku yang cenderung tertutup ini boleh jadi eksek dari pengalaman hidup bersama antar masyarakat muslim dengan non-muslim yang minim sebagai akibat dari dominasi populasi yang sedemikian mutlak (di atas 80%). Ini terlihat di wilayah yang populasi agama yang “relatif” berimbang, seperti di Kutai Barat, Malinau dan Tanah Tidung. Kecenderungan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan rumah ibadah agama lain relatif baik atau di daerah mayoritas muslim tetapi memiliki pengalaman sosial dalam relasi antarkelompok agama seperti di Nunukan.

Di Berau misalnya, pengalaman sosial saling membantu pembangunan rumah ibadah memang tidak menjadi memori sosial yang monumental dalam masyarakat. Tidak pernah ada terdengar cerita yang romantik tentang keterlibatan masyarakat muslim terlibat dalam *event* sosial masyarakat Kristen misalnya dalam pembangunan rumah ibadah agama nonmuslim. Kecuali, pada hari raya lapangan Gereja Katolik yang berada tepat di depan Masjid Raya Berau biasa digunakan sebagai tempat parkir jemaah lebaran.

Selain itu kecenderungan resistensi masya-

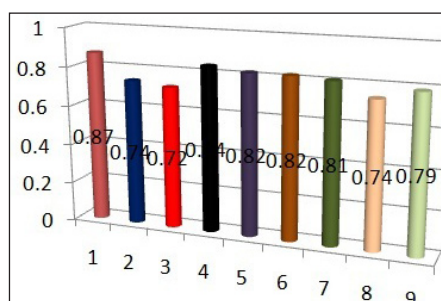
rakat muslim terhadap pembangunan rumah ibadah agama nonmuslim terlihat meski dengan skala yang tidak terlalu besar. Misalnya penolakan warga muslim terhadap pembangunan gereja Katolik dan Gereja Komunitas Kristen Batak di Berau.² Resistensi ini tercermin dalam respon publik seperti terlihat pada tabel Grafik 5.3 (indeks 0,47).

Pengalaman masyarakat Paser pada tahun 1995 menunjukkan sensitifitas sosial (terutama dari kalangan muslim) berkaitan dengan rumah ibadah. Ketika itu, umat Islam melakukan protes karena akan dipasang lonceng berukuran besar di Gereja Katolik Paroki Alleluia, Jalan RA Kartini, Tanah Paser (dulu Tanah Grogot). Sebelum lonceng dipasang, informasi ini sudah tersebar luas di tengah masyarakat, terutama umat Islam. Alhasil, orang Islam dan beberapa pengurus ormas Islam melakukan protes dan turun ke jalan. Intinya, mereka meminta pihak gereja untuk membatalkan pemasangan lonceng tersebut, yang kabarnya, suara gaungnya bisa terdengar hingga beberapa kilometer. Jika hal itu terjadi, masyarakat yang tinggal di sekitar gereja, terutama lagi orang Islam mengaku terganggu. Selain lonceng, pihak gereja juga diminta untuk membatasi tinggi menara, yang sedianya digunakan untuk memasang lonceng. Akibat protes keras ini, pihak gereja kemudian membatalkan memasang lonceng dan juga menurunkan ketinggian menara. Yang patut disyukuri, aksi protes ini tidak menimbulkan perkelahian. Apalagi, mereka melakukannya dengan cara damai, meski turun ke jalan-jalan. Di lain pihak, pengurus gereja Katolik juga menerima protes tersebut dengan lapang dada. Buktinya, pihak gereja sampai sekarang ini batal memasang lonceng itu. Begitu pula menara, yang sekarang tingginya hanya sekitar 10 meter.³

Sebaliknya, pengalaman masyarakat Nunukan yang memiliki tradisi saling mengunjungi dan saling membantu dalam proses pembangunan rumah ibadah menjadi memori sosial yang mendorong masyarakat Nunukan terbuka untuk terlibat dalam proses pembangunan rumah ibadah agama.⁴ Apalagi, pemandangan rumah ibadah yang relatif berdekatan terlihat dengan jelas. Beberapa masjid dan gereja (dari berbagai denominasi) berdiri berdampingan (atau dengan jarak yang tidak terlalu jauh). Sikap akomodatif ini terlihat pada indeks yang mencapai 0,70 (baik).

Hal lain yang menarik adalah kecenderungan eksklusifisme dalam konteks pembangunan rumah ibadah terjadi di dua kota yang jumlah penduduknya sangat banyak, Samarinda dan Balikpapan (sedangkan indeks Kukar berada di level baik, tetapi hanya berada 2 poin dari level buruk). Kecenderungan ini dipengaruhi oleh (sekali lagi) pengalaman hidup bersama memang tidak sampai pada level yang sifatnya “teologis” akibat dari dominasi populasi.

Grafik 5.4: Variabel Eksistensi Agama dan Konflik



Keterangan: 1) Tidak menyerang penganut agama lain; 2) Egoisme pengeyab konflik; 3) Kepentingan politik penyebab konflik; 4) Kerjasama antar umat dapat meredam konflik; 5) Bersedia berdamai pasca konflik; 6) Salah faham penyebab konflik; 7) Penyebaran agama dilarang; 8) Musyawarah pembangunan tempat ibadah; 9) Peran tokoh agama

Sumber data: angket yang diolah

² Wawancara dengan Pastor Stanis, Frans dan Pendeta Andik tanggal 27 Maret 2012 di Berau.

³ Sebagai bentuk apresiasi kepada umat Katolik, umat Islam juga membatasi penggunaan pengeras suara di masjid-masjid. Untuk adzan, misalnya, hanya diperbolehkan menggunakan pengeras suara luar satu kali. Sementara suara bunyi-bunyian lain hanya dibolehkan menggunakan pengeras suara yang cuma dapat didengar oleh orang-orang di dalam masjid. Pada saat Ramadhan, pengurus masjid juga tidak dibolehkan mengeraskan suara bunyi-bunyian dari masjid. Baik itu suara orang *tadarrusan* dengan menggunakan pengeras suara maupun yang memutar tape, apalagi sampai tengah malam. Wawancara dengan H. Abu Bakar Syam, Sekretaris FKUB Kab. Paser, tanggal 29 Maret 2012 di Paser.

⁴ Wawancara dengan Pdt Martha, tanggal 26 Maret 2012 di Nunukan.

Variabel 2 ini dengan sembilan indikator, bertujuan untuk mengetahui persepsi responden terhadap eksistensi agama, konflik, dan resolusi konflik. Subvariabel yang dimaksud meliputi penyebaran agama, etika antarkelompok agama, faktor penyebab konflik, dan proses penyelesaian konflik.

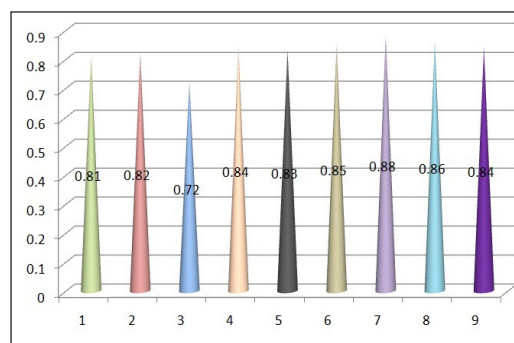
Data pada grafik 5.4 menunjukkan bahwa seluruh subvariabel yang diukur mengindikasikan hal yang positif. Seluruh subvariabel mendapatkan indeks baik dan sangat baik (antara 0,72-0,87). Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kaltim telah memiliki *mindset* yang damai dalam konteks hubungan antarumat beragama. Sebagian besar responden memahami bahwa penyebaran agama kepada orang yang telah memiliki agama tidak boleh dilakukan (indikator 7, indeks 0,81). Mayoritas responden juga memahami bahwa tidak dibenarkan menyerang penganut agama lain (indikator 1 indeks 0,87). Ini berarti bahwa etika hubungan antarumat beragama dengan rambu-rambu tertentu telah dipahami dengan baik oleh masyarakat Kaltim. Hal ini diperkuat dengan kesediaan para responden untuk berdamai dengan orang yang pernah konflik (indikator 5, indeks 0,82).

Dalam konteks penyebab konflik, mayoritas responden sangat setuju kalau penyebab konflik adalah soal egoisme kelompok agama tertentu (indikator 2, indeks 0,74), kepentingan politik dan kekuasaan (indikator 3, indeks 0,72), dan salah pengertian antartokoh agama (indikator 6, indeks 0,82). Ini menunjukkan bahwa dalam persepsi publik Kaltim, konflik antarkelompok agama bisa terjadi lebih karena faktor-faktor yang sifatnya teknis dan politis, bukan perbedaan prinsip ajaran dasar dalam agama.

Hal yang menarik adalah resolusi konflik. Para responden sangat setuju kalau persoalan konflik dapat diselesaikan melalui musyawarah (indikator 4, indeks 0,84 dan indikator 8, indeks 0,74). Jika subvariabel 8 dikaitkan dengan subvariabel 6 pada variabel 1 maka terlihat ada kecenderungan yang menarik. Meski indeks kesediaan membantu pembangunan rumah ibadah

di beberapa daerah terlihat buruk, tetapi mereka tetap setuju jika pembangunan rumah ibadah dilakukan asal melalui musyawarah terlebih dahulu. Hal ini dapat pula berarti bahwa persoalan pembangunan rumah ibadah selama ini terjadi karena tidak adanya musyawarah yang egaliter antar pihak-pihak terkait.

Grafik 5.5: Variabel Kebijakan Pemerintah



Keterangan: 1) Pembangunan rumah ibadah seizin pemerintah; 2) Kebijakan pemerintah mempercepat penyelesaian konflik; 3) Pemerintah perlu melindungi aliran dari serangan; 4) Ketegasan pemerintah terhadap kelompok garis keras; 5) Pemerintah memfasilitasi dialog antar kelompok agama; 6) Sosialisasi peraturan tentang kerukunan dan pendirian rumah ibadah; 7) Pemerintah harus bekerja sama dengan tokoh agama; 8) Pemerintah membentuk FKUB hingga ke tingkat bawah; 9) Pemerintah memasukan muatan kerukunan dalam sekolah.

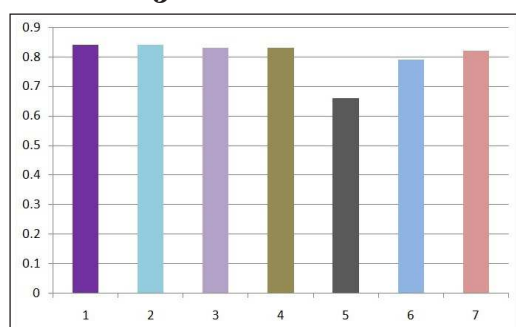
Sumber data: angket yang diolah

Variabel ketiga ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi publik terhadap pemerintah dalam konteks pembangunan kerukunan antarumat beragama. Variabel ini berisi sembilan sub variabel sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas.

Secara umum persepsi dan ekspektasi publik terhadap pemerintah sangat tinggi; 8 dari 9 sub-variabel yang diukur mendapatkan nilai indeks sangat baik (antara 0,81-0,88). Ini berarti masyarakat Kaltim sangat berharap kepada pemerintah untuk berperan aktif dalam konteks pencegahan konflik dan pembangunan kerukunan umat beragama. Dalam hal pembangunan rumah ibadah (yang acapkali menuai perselisihan di kalangan umat beragama), publik Kaltim sangat setuju terhadap keterlibatan pemerintah terutama soal perizinan (indikator 1, indeks 0,81).

Hal menarik yang dapat dibaca dari data tabel di atas adalah persetujuan publik terhadap keharusan pemerintah bersikap tegas terhadap kelompok atau organisasi yang melakukan tindak kekerasan (indikator 4, indeks 0,84) dan pemerintah harus melindungi kelompok aliran yang mendapatkan tekanan (indikator 2, indeks 0,72). Dua subvariabel ini menegaskan karakter damai dan anti kekerasan di masyarakat Kaltim.⁵

Grafik 5.6: Variabel Peran Ormas



Keterangan: 1) Keaktifan kelompok agama dalam kerukunan; 2) Dialog untuk menyelesaikan konflik; 3) Peran tokoh adat dalam menjaga kerukunan; 4) Peran tokoh adat dalam menciptakan harmoni sosial; 5) Keefektifan hukum adat dalam penyelesaian konflik; 6) Keterlibatan organisasi etnis dalam kerukunan; 7) Keterlibatan tokoh etnis.

Sumber data: angket yang diolah.

Variabel keempat ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi publik terhadap pembangunan kerukunan umat beragama berbasis potensi lokal. Potensi lokal yang dimaksud adalah ormas, tokoh adat dan etnik, dan hukum adat yang ada.

Data pada Grafik 5.6 menunjukkan bahwa secara umum publik Kaltim mempersepsikan signifikansi potensi lokal dalam upaya membangun kerukunan antarumat beragama. Peran tokoh adat, tokoh etnik dan ormas keagamaan yang ada sangat dibutuhkan (indikator 1, indeks 0,84; indikator 3 dan 4, indeks 0,83; indikator

7, indeks 0,82).

Menariknya, persepsi publik terhadap peran hukum adat juga baik (indikator 0,66), padahal konstruksi demografi Kaltim lebih banyak dikuasai oleh kaum pendatang terutama Bugis, Jawa, dan Banjar. Hal ini menarik karena dalam banyak kasus, hukum adat dianggap tidak efektif. Misalnya kasus pencurian yang dilakukan oleh orang Bugis di rumah orang Dayak (kasus ini terjadi di Sangata). Kaum adat Dayak menginginkan pelaku diadili dengan hukum adat Dayak dengan membayar denda. Tetapi pihak pelaku merasa keberatan karena menganggap diri bukan orang Dayak. Kasus ini sempat menjadi polemik.⁶ Ini berarti bahwa hukum adat setidaknya dapat digunakan sebagai alat *safety valve* konflik dan sebagai alat untuk merekonstruksi hubungan sosial.

Membahas Indeks 0,79

Isu konflik berbasis agama di Provinsi Kalimantan Timur tidak populer. Sangat jarang atau bahkan tidak pernah terdengar ada kasus sosial yang merembet menjadi isu agama. Hal ini menjadi konfirmasi atas capaian indeks kerukunan antarumat beragama dengan poin 0,79 atau sangat baik. Artinya publik Kaltim mempersepsikan relasi antarkelompok agama sejauh ini berjalan secara baik dan harmonis. Setidaknya ucapan seorang pejabat publik Provinsi Kaltim yang direkam oleh Kaltim Pos pada bulan Pebruari 2011 bahwa penduduk Samarinda adalah penduduk yang cinta damai dan telah terbiasa hidup dalam perbedaan etnik dan agama dan esai Tania⁷ tentang kerukunan umat beragama di Balikpapan menjadi refleksi simbolik dari citra damai itu, terutama dari sudut pandang agama. Konflik antara komunitas Tidung dan Bugis di Tarakan pada ta-

⁵ Hal ini bisa menjadi *counter* wacana terhadap kebijakan Walikota Samarinda yang mengeluarkan SK Pembekuan terhadap aliran Ahmadiyah yang merupakan desakan dari kelompok FPI pada medio 2011 yang lalu.

⁶ Wawancara dengan Ketua FKUB Kutai Timur, di Sangata tanggal 29 Maret 2012

⁷ Tania adalah siswi SMAN 1 Balikpapan yang memenangkan lomba essay nasional (berbahasa Inggris) dengan mengangkat tema kerukunan di Balikpapan. Secara ringkas isi essaynya menggambarkan bahwa Balikpapan adalah kota tanpa suku asli, dipenuhi dengan para pendatang dari berbagai suku di nusantara. Jauh dari kata kerusuhan. Kalaupun ada perselisihan, semua sudah tahu, pastilah itu muncul dari segelintir orang yang memiliki konflik kepentingan. Tania membandingkan Balikpapan dengan Singapura yang karena kepentingan ekonomi, semua orang ingin stabilitas dan kenyamanan. Dikutip dari Kaltim Post.co.id. *Angkat Singapura dan Balikpapan, Paparkan Kerukunan Perbedaan*. Diakses tanggal 1 Mei 2012.

hun 2010 yang lalu tidak dianggap sebagai bukan konflik agama mengingat dua etnik yang bertikai berbasis agama yang sama.

Kerukunan antarkelompok agama di Kaltim bisa jadi merupakan refleksi dari dominasi populasi penganut agama Islam. Hampir di semua wilayah (kecuali Kutai Barat dan Malinau), jumlah pemeluk Islam mencapai angka 80% ke atas, bahkan di Kabupaten Paser mencapai 90%. Apalagi di daerah perkotaan, hampir seluruhnya dikuasai penganut Islam. Umat Kristiani yang berbasis etnik Dayak lebih banyak tinggal di daerah pegunungan dan pedalaman, seperti di Lung Anay (Kutai Kertanegara). Dominasi populasi ini mempersempit ruang pergeseran konflik sosial antarkelompok agama. Konflik sosial yang mungkin terjadi justru di kalangan penganut agama yang sama seperti kasus Tarakan.

Konstruksi sosial di Kaltim agak berbeda dengan Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Masyarakat Kaltim tidak memiliki idiom budaya untuk dijadikan referensi bersama sebagaimana idiom *torang samua basudara* di Sulut dan *mali siparappemalilusipakainga* di Sulse. Ruang sosial Kaltim dipenuhi dengan berbagai etnik dengan kecenderungan primordialisme tinggi. Seluruh etnik yang ada tidak sepenuhnya lepas dari ikatan kulturalnya dan lalu membentuk kebudayaan *hybrid*. Masyarakat Bugis yang telah ada sejak ratusan tahun dan masyarakat Jawa yang juga telah berbasis di Kaltim sejak puluhan tahun tetap memelihara cita rasa lokalitasnya. Pembentukan ikatan kekeluargaan atau pagu-yuban berbagai etnik menjadi penegasan dari kekuatan etnisitas ini. Bugis tetap Bugis, Jawa tetap Jawa, dan sebagainya. Anak-anak muda Bugis dan Jawa tetap mahir berbahasa Bugis dan Jawa. Kampung-kampung Bugis di Kaltim pun tak ubahnya dengan daerah asalnya. Misalnya di Dusun Batua (Kutai Kertanegara) yang sebagian besar penduduknya berasal dari Soppeng. Nuansa bahasa Bugis dengan dialek Soppeng khas terdengar. Selain itu nuansa khas bahasa Bugis Bone yang sangat kental juga terdengar dari para sopir truk yang melintasi jalur Samarinda Berau, meski mereka telah hidup

puluhan tahun di Kalimantan Timur.

Dengan demikian patron kerukunan antarumat beragama tidaklah berasal dari kesepakatan bersama yang berbasis nilai lokal tetapi berasal dari makna kemanusiaan yang diekspresikan dalam idiom yang berbeda. Di samping itu kepentingan ekonomi yang pragmatis sebagai tipikal masyarakat perkotaan menjadi faktor penentu kohesi sosial. Sebagaimana diketahui masyarakat Kaltim (perkotaan) adalah masyarakat industri dan perdagangan; tipikal masyarakat ekonomi sangat antikonflik, bukan dalam konteks kesadaran sosial tentang pentingnya hidup bersama tetapi lebih karena kepentingan penyelamatan aset ekonomi dan itu membutuhkan stabilitas sosial.

Lepas dari semua itu hasil penelitian ini menemukan dua hal yang diharapkan menjadi pilar penting dalam pembangunan kerukunan umat beragama di Kalimantan Timur. *Pertama*, peran serta pemerintah. Dalam situasi masyarakat yang multietnik dan multikultur kebijakan pemerintah yang adil dan tidak memihak kepada satu agama, etnik, dan kultur tertentu menjadi hal yang sangat perlu dilakukan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun kohesi sosial dan saling pengertian di antara warganya agar terhindar dari kesalahan persepsi yang berujung pada lahirnya ketidakadilan.

Sebagai contoh, ketidakadilan distributif yang dialami oleh warga Katolik di Berau dalam soal distribusi penyuluh agama. Meski secara nominal jumlah warga Katolik lebih banyak dibandingkan warga Kristen tetapi distribusi penyuluh agama Kristen oleh Kementerian Agama setempat lebih banyak. Ini terjadi karena persepsi terhadap Kristen dianggap tunggal. Katolik dianggap sebagai salah satu sekte dari Kristen saja. Akibatnya organisasi BAMAK Berau pun melibatkan dua agama tersebut dalam kepengurusannya.⁸ Padahal, Katolik dan Kristen adalah dua agama yang berbeda.

Kedua, keterlibatan tokoh masyarakat. Persepsi publik Kaltim terhadap peran penting tokoh masyarakat dalam mengelola kerukunan

sangat tinggi. Masyarakat Kaltim berharap peran aktif para tokoh masyarakat dapat meredam terjadinya konflik sosial. Ekspektasi terhadap hal ini sangat wajar mengingat peran tokoh masyarakat (terutama tokoh agama dan tokoh etnik) menjadi sangat vital dalam masyarakat multietnik.

Sejauh ini peran tokoh masyarakat dalam meredam proses konflik dan membangun situasi harmonis berjalan dengan baik. Misalnya di Kutai Barat, peran tokoh masyarakat Bugis dan Dayak dalam membangun proses perdamaian yang berujung pada dibangunnya tugu perdamaian menjadi titik penting relasi sosial yang harmonis. Tugu ini dibangun sebagai resolusi dari proses konflik sosial yang melibatkan dua etnik, Bugis dan Dayak pada tahun 1985. Setelah itu tidak pernah lagi terdengar ada letupan sosial dalam skala yang cukup besar.

Peran tokoh masyarakat Paser dalam meredam konflik antaretnik Madura dan Paser menjadi contoh lain dari pentingnya peran tokoh masyarakat. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. Waktu itu seorang pemuda Madura yang tengah naik motor tiba-tiba terjatuh dari sepeda motornya dan pingsan. Saat terjatuh, pemuda itu ditolong oleh anak muda Paser. Tanpa diduga, teman-teman pemuda Madura yang jatuh dari motor tadi datang ke lokasi kejadian dan menuduh pemuda Paser itu memukul temannya sehingga terjatuh dari motor. Tentu saja pemuda Paser ini tidak menerima diperlakukan begitu.

Alhasil, keributan pun terjadi dan mulai membawa-bawa nama etnis. Apalagi teman-teman pemuda Paser juga ikut berdatangan dan ingin membantu temannya. Beruntung, sebelum terjadi perkelahian beberapa tokoh masyarakat dan pengurus Gepak berdatangan ke lokasi. Sebagai solusi, beberapa orang Madura di daerah tersebut, yang diduga kerap kali membuat onar akhirnya diminta secara paksa oleh tokoh

masyarakat dan Gepak meninggalkan daerah itu. Pengusiran warga Madura ini tidak berdampak apa-apa karena tokoh-tokoh masyarakat terlibat secara penuh.

Pertanyaan yang mungkin dapat diajukan adalah bagaimana kedalaman relasi antarumat beragama di Kaltim ini? Dan bagaimana tingkat ketahanan dua pilar yang menjadi payung yang melindungi atmosfer kerukunan selama ini? Pertanyaan ini penting mengingat pola kerukunan yang biasa ditampilkan kadang-kadang bersifat mekanik. Hubungan penganut agama yang terjadi mungkin bisa tampak bagus tetapi hanya pada tataran permukaan. Hal ini lazim disebut dengan inklusivisme atau toleransi pada tataran pasif. Penganut agama yang satu bisa mengasumsikan bahwa kebenaran bisa pula ada pada yang lain tetapi masih menyatakan yang tertinggi adalah agama yang dianut. Persoalannya tidak selesai di situ tetapi juga prinsip ini biasanya tidak mampu mendorong keinginan untuk menjalin interaksi yang lebih dalam. Prinsip *agamamu adalah agamamu* dan *agamaku adalah agamaku* kental dalam hubungan semacam ini. Yang menonjol dari sikap semacam ini adalah menerima keragaman sebagai sesuatu yang faktual. Artinya mereka sadar bahwa orang diciptakan berbeda maka tidak ada pilihan kecuali toleran terhadap orang lain yang berbeda tersebut.

Problem terbesar dari hubungan semacam ini adalah tidak bisa meretas rasa curiga antara satu dengan yang lain. Setidaknya kasus kesulitan membangun rumah ibadah yang dialami masyarakat Kristen di beberapa tempat adalah ekspresi dari itu. Statistik penelitian juga menunjukkan pada aspek yang berhubungan dengan persoalan teologis mengalami penurunan respon (meski sebagian masih baik). Demikian halnya tidak bisa menghilangkan dominasi agama tertentu yang mayoritas terhadap yang lain. Jika merujuk pada Walzer maka pola hubungan semacam ini hanya memenuhi dua substansi toleransi yaitu

⁸ Sejak tahun 2011, pihak Katolik mundur dari BAMA karena alasan perbedaan identitas. Wawancara Pastor Frans, 25 Maret 2012.

menerima perbedaan untuk hidup damai dan menerima bahwa orang lain juga memiliki hak. Ada 3 hal penting lainnya yang tidak terpenuhi yaitu mengeksperesikan keterbukaan terhadap yang lain, dukungan penuh terhadap perbedaan dan ingin belajar serta mendengarkan dari orang lain. Apalagi, dalam konteks masyarakat Kaltim, kerukunan antarumat beragama tidak sepenuhnya berasal dari pengalaman hidup sehari-hari, mengingat jumlah populasi masyarakat Kaltim nonmuslim sangat sedikit. Populasi masyarakat Kristen terbesar adalah masyarakat Dayak yang hidup di tengah hutan.

Dengan demikian kerukunan umat beragama yang terjadi di Kaltim boleh jadi masih merupakan imbas perukunan masa Orde Baru (teori struktural). Perukunan berbeda dengan kerukunan, karena kata yang pertama adalah sebuah proses pemaksaan rukun demi stabilitas nasional. Cara ini biasanya dengan menggunakan model *melting pot*, yaitu satu proses peleburan identitas. Semua identitas primordial (termasuk agama) dihilangkan dan lebur masuk ke dalam identitas nasional. Cara ini biasanya berhasil sejauh stabilitas politik mapan, namun akan mulai terkoyak-koyak jika politik mulai goncang. Padahal Amy Gutmaan secara tegas menyatakan identitas keagamaan (primordial) yang ingin muncul tidak selalu harus ditekan, karena itu tidak selamanya bertentangan dengan demokrasi. Sejauh bertumpu pada aturan hukum yang baik, maka justru bisa sejalan belaka.

Problem kerukunan yang patut diwaspadai adalah segregasi identitas yang terbangun sejak lama. Konflik Bugis-Dayak yang sering terjadi

di beberapa daerah di Kaltim sejak tahun 1980-an adalah representasi dari pemaknaan identitas pendatang-lokal. Perebutan sumber daya pertanian, perbedaan cara pandang terhadap tanah, redistribusi politik, hingga perbedaan afinitas keagamaan adalah sumber konflik yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Problem etnisitas ini memang telah lama terjadi dan menjadi “riak” dalam konteks kerukunan dalam masyarakat Kaltim. Problem etnisitas ini akan semakin parah dengan munculnya korporasi yang memanfaatkan sumber daya lokal sebagai *centeng* untuk melindungi kepentingannya. Misalnya penggunaan Lasykar Dayak untuk menjaga pabrik-pabrik dari perusahaan tertentu.⁹

PENUTUP

Simpulan

Dari data-data dan pemaparan di atas kita bisa mengemukakan beberapa kesimpulan: *Pertama*, Indeks Kerukunan Beragama di Kalimantan Timur berada pada kategori sangat baik (0,79). Dari empat variabel yang diukur seluruhnya mendapatkan nilai indeks sangat baik kecuali variabel pertama. Pada variabel pertama, terlihat subvariabel yang berkaitan dengan kesediaan terlibat dalam pembangunan rumah ibadah agama lain mendapatkan nilai terendah.

Kedua, indeks kerukunan yang sangat baik ini ditunjang oleh sikap masyarakat dalam hubungan sosial yang tidak mempermasalahkan perbedaan agama, potensi lokal yang mendukung hidup bersama secara damai dan peran pemerintah serta tokoh agama, tokoh etnik, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang proaktif dalam mencegah serta mengatasi konflik yang terjadi.

⁹ Pascareformasi, muncul fenomena sosial yang mengarah pada penguatan identitas lokal. Masyarakat Dayak Kota yang selama ini merasa terpinggirkan mulai melakukan gerakan penguatan identitas dengan memunculkan organisasi seperti GEPAK (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan), Badan Komunikasi Dayak Kalimantan Timur, dan Lasykar Dayak. Kemunculan ormas berbasis etnik Kaltim dengan mengusung diksi “asli” dapat dibaca dalam dua hal. *Pertama*, penegasan identitas sebagai komunitas yang paling berhak merepresentasi Kaltim. Dayak, Bajau, Banua, Banjar adalah kelompok etnik yang telah mendiami bumi Kalimantan sejak lama. Merekalah yang disebut sebagai kelompok pribumi atau asli Kaltim. *Kedua*, politik diferensiasi dan resistensi. Dengan menggunakan diksi asli atau nama suku lokal, ormas-ormas ini ingin merepresentasikan diri sebagai orang asli yang berbeda dengan pendatang. Karena itu, mereka pun memiliki hak yang sama bahkan jauh lebih besar dalam soal pengelolaan sumber daya alam. Entitas berbasis etnik ini memang sangat menguat dalam proses pilkada. Para kandidat biasanya senang menggunakan basis primordialnya sebagai jualan politik untuk menarik minat warganya.

Ketiga, konflik yang terjadi di beberapa daerah pemicunya di luar hal-hal yang terkait dengan agama terutama soal etnisitas, bila tidak ditangani dengan baik akan merembet ke konflik dengan isu-isu yang terkait dengan agama, seperti kasus yang sempat terjadi di Kutai Barat tahun 1985, Paser tahun 2008, Tarakan 2010, dan Bulungan tahun 2012.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka direkomendasikan:

1. Pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama yang sudah terjalin dengan baik dengan melanjutkan program kerukunan yang sudah ada, namun ditekankan pada kehidupan bersama yang lebih kultural (*proeksistensi*).
2. Melihat peran FKUB yang sangat penting, diharapkan pemerintah memfasilitasi pembentukan organisasi ini hingga tingkat kecamatan.
3. Meski hubungan sosialnya terbuka, tetapi isu pendirian rumah ibadah cenderung menunjukkan respon yang rendah. Oleh karena itu, regulasi tentang pendirian rumah ibadah perlu terus menerus disosialisasikan dan disesuaikan dengan karakter lokal yang ada. Penerapan aturan secara nasional jangan sampai justru menjadi salah satu alat pemicu keretakan sosial karena tidak jelasnya sosialisasi aturan tersebut.
4. Mewaspadaikan potensi konflik pada aspek hubungan etnisitas yang telah sering terjadi dalam skala kecil dengan melakukan pelatihan sistem deteksi dini (*early warning system*) dan *peace building* di kalangan pemuda lintas agama secara serial.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kaltim. 2012. *Provinsi Kaltim dalam Angka 2011*.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamdan. 2008. *Kerukunan Umat Beragama*. <http://www.win2pdf.com>
- Misrawi, Zuhairi. 2007. *Al-Qur'an Kitab Tolerasi*. Jakarta: Fitrah Publishing
- Parekh, Bikhu. 2000. *Rethinking Multiculturalism: Culture Diversity and Political Theory*. London: Macmillan.
- Prasetyo, Bambang & Linah Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Metode dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukidi. 2001. *Teologi Inklusif Cak Nur*. Jakarta: Kompas.
- Suseno, Frans Magnis. 2005. *Pluralisme dalam Sengketa*. Makalah disampaikan dalam seminar Tafsir Aktual atas Pluralisme, 12 Oktober 2005.
- Tim Peneliti Litbang Agama Makassar. 2009. *Potret Kerukunan Umat Beragama di Sulsel*. Balai Litbang Agama Makassar
- . 2010. *Potret Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Tengah*. Balai Litbang Agama Makassar.
- . 2011. *Potret Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara*. Balai Litbang Agama Makassar.
- . 2008. *Jarak Sosial Umat Beragama di Indonesia Timur*. Balitbang Agama Makassar.
- Turner, Bryan, S. 1991. *Agama dan Teori Sosial*. Yogyakarta: Ircisod.
- Walzer, Michael. 1997. *On Toleration*. Yale University Press: New Haven and London.